

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.-1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat selama ini biasanya dianggap sebagai indikator pembangunan yang utama. Namun, sebenarnya ada ketidakpuasan dengan penggunaan pertumbuhan yang diukur dengan laporan nasional sebagai tolok ukur. Yang lebih bermakna sebenarnya adalah kesejahteraan, yang terdiri dari konsumsi, pembangunan manusia dan kelestarian lingkungan, serta kualitas distribusi dan stabilitas mereka. Kerap kali pertumbuhan pendapatan perkapita serta perbaikan kesejahteraan bergandengan tangan. Namun, terkadang tidak demikian (Vinod Tomas, 2000)

Keserasian dan optimalisasi pemanfaatan ruang diperlukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan wilayah dalam hal tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah dan dalam hal pendapatan dan kemakmuran. Pemanfaatan ruang tanpa disertai perencanaan tata ruang mengakibatkan terjadinya perkembangan yang pesat di satu daerah, sementara di daerah yang lain masih dalam kondisi yang terbelakang. Adanya perkembangan yang tidak seimbang ini telah menyebabkan tekanan penduduk pada kota-kota besar semakin intensif dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks terutama dalam penyediaan prasarana perkotaan (Muljadi, 1989 dalam Hardjanti, 2000).

Konsep yang digunakan dalam usaha untuk pengembangan wilayah Indonesia sebagaimana dikemukakan Hardjisarono Purnomosidi (1981) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhannya.
2. Memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
3. Memelihara efisiensi pertumbuhan nasional.

Keberhasilan dari tujuan konsep pengembangan wilayah tersebut adalah merupakan titik keberhasilan dari pembangunan. Sehingga konsep pewilayahan pembangunan akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Bagi Indonesia kota-kota menengah mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan jangka panjang. Kota-kota menengah ini akan menjembatani dan menghubungkan kota-kota metropolitan dan kota-kota besar dengan kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Membangun dan mengembangkan kota menengah berarti melakukan upaya membentuk hirarki yang jelas dimana akan membantu mekanisme penjalaran pertumbuhan dan perkembangan dari kota-kota besar ke daerah-daerah (kota-kota yang lebih rendah hirarkinya). Manfaat lain dari keberadaan kota-kota menengah bagi Indonesia adalah bahwa kota-kota sedang tersebut akan mampu menyerap sejumlah besar penduduk pedesaan (sehingga mengurangi arus migrasi ke kota-kota besar dan kota metropolitan), menyediakan layanan kesehatan dan kesempatan kerja bagi mereka dan memperbesar akses mereka untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan, menstimulasi ekspansi produksi pangan pada skala besar melalui *urbanbased technology* dan metode-metode pengelolaan (Rondinelli, 1982).

Kedudukan Kartasura sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah Sukoharjo, yang lokasinya berbatasan langsung dengan kota Surakarta menyebabkan harus selalu terdapat keselarasan dengan kebijakan pembangunan Surakarta. Bahkan pada wilayah Jawa Tengah selatan bagian timur (bagian dari Satuan Kawasan Pembangunan IV) harus selalu terdapat keselarasan dalam pembangunan yang mempunyai implikasi pengembangan kegiatan dengan wilayah kotamadya Surakarta, kota-kota kabupaten dan kota-kota kecamatan yang ada di sekitarnya. Kecamatan Kartasura mempunyai peran sangat penting strategis karena digunakan sebagai acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan berbagai aktivitas masyarakat yang mengakibatkan Berubahnya struktur dan pemanfaatan pada ruang kota. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa selama kurun waktu tertentu telah terjadi perubahan ataupun penyimpangan terhadap tujuan perencanaan tersebut.

Penetapan tata ruang menyangkut penetapan struktur kota yang optimal. Adapun kebijakan tata ruang dirumuskan untuk dapat menghasilkan rencana tata

lahan yang didasarkan pada kondisi eksiting penggunaan tanah, struktur tanah/lahan, jaringan, utilitas, aksesibilitas, hubungan fungsional, lanskap kota, fungsi kawasan dan kemampuan lahan.

Dalam lingkup internal, perumusan konsep struktur tata ruang Kecamatan Kartasura didasarkan pada pertimbangan :

- a. Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan eksiting yang menunjukkan pola sebaran lokasi kegiatan-kegiatan utama kota (permukiman, perdagangan dan jasa, pemerintahan, pertanian dan industri) serta keterkaitannya sama lain.
- b. Keberadaan pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan (terutama perdagangan dan jasa komersial dan pemerintah) yang terkonsentrasi pada beberapa lokasi tertentu dengan wilayah pelayanan masing-masing. Dalam hal ini peranan pusat kota yang ada selama ini menjadi *Central Business Distrait (CDB)* dan pusat pemerintahan masih relative dominant.
- c. Pola jaringan jalan utama yang telah ada dan akan dikembangkan baik yang berfungsi sebagai jalan kolektor (primer dan sekunder) maupun jalan lokal.

Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang serta menerapkan konsepsi pengembangan tata ruang Kecamatan Kartasura sebagai mana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Kecamatan Kartasura tahun 2000, dirumuskan strategi pengembangan tata ruang yang mencakup :

- a. Strategi pengembangan system pusat-pusat kegiatan perkotaan dengan pengembangan kegiatan fungsional daerah masing-masing secara terpadu.
- b. Strategi pengembangan sistem prasarana
- c. Strategi pemanfaatan ruang kota

Hadi Sabari Yunus (1987), menyatakan bahwa pengembangan perkotaan adalah suatu usaha yang dijalankan manusia untuk mengelola proses perubahan yang terjadi didalam daerah perkotaan dan untuk mencapai esuatu keseimbangan lingkungan yang harmonis. Pertumbuhan dan perkembangan kota secara langsung akan menyebabkan terjadinya pemekaran kota yang berdampak pada perubahan fungsi lahan di daerah sekitarnya.

Kecamatan Kartasura yang merupakan kota dalam skala menengah sebagaimana yang dikemukakan Rondinelli di atas, memiliki peran sebagai

jembatan penghubung yang menghubungkan wilayah desa-desa di sekitarnya dengan kota Surakarta sebagai kota besar. Pembangunan yang dilaksanakan di kota ini baik pembangunan fasilitas fisik maupun ekonomi, pada satu sisi akan dapat memenuhi atau mendekatkan fasilitas kepada penduduk desa di sekitarnya, sedangkan pada sisi yang lain keberadaan dan pembangunan fasilitas ini akan dapat mendorong perkembangan sosial, ekonomi penduduk Kartasura sendiri.

Kecamatan Kartasura merupakan salah satu kota kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Sukoharjo, yang jaraknya dari pusat kabupaten Sukoharjo sekitar 25 km ke arah barat daya (Sumber BPS Kab. Sukoharjo 2004) . Adapun batas-batas kecamatan ini secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah selatan : Kecamatan Gatak
- Sebelah barat : Kabupaten Boyolali
- Sebelah timur : Kotamadya Surakarta

Perubahan bentuk penggunaan lahan pada dasarnya adalah berubahnya bentuk penggunaan lahan dari penggunaan semula. contoh lahan yang semula untuk persawahan kemudian pada tahun berikutnya berubah fungsinya menjadi permukiman, perusahaan dan penggunaan lainnya. Penggunaan lahan di daerah penelitian berdasarkan data dari Kecamatan Kartasura dalam angka tahun 1995 dan 2004 secara umum dibagi menjadi dua yaitu penggunaan lahan pertanian dan non pertanian. Adapun besarnya perubahan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Kartasura dan 2004

No	Bentuk Penggunaan Lahan	Tahun 1995		Tahun 2004		Perubahan
		Luas (ha)	Persen	Luas (ha)	Persen	
1	Tanah sawah	606	31,51	559	29,07	47
2	Bangunan/Pekarangan	1.174	61,05	1.216	63,23	42
3	Lainya	143	7,44	148	7,70	5
Jumlah		1.923	100,00	1.923	100,00	94

Sumber : Kecamatan Kartasura Dalam Angka Tahun 1998 dan 2004

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan terbesar adalah dari tanah sawah ke bangunan/pekarangan. Lahan bangunan/pekarangan tahun 1998 menempati areal seluas 1.174 Ha

sedangkan pada tahun 2004 berkembang menjadi seluas 1.216 Ha yang berarti mengalami kenaikan sebesar 42 Ha. Terjadinya peningkatan penggunaan lahan yang besar pada sektor perumahan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kartasura mengalami perkembangan yang cukup tinggi, dimana dampaknya adalah tinggi pula kebutuhan akan perumahan.

Posisi relatif Kartasura terletak pada pertemuan jalur transportasi yang menghubungkan tiga kota besar yaitu Surakarta, Semarang dan Yogyakarta. Selain itu kecamatan ini dibelah oleh jalur transportasi utama pulau Jawa yaitu jalur tengah yang merupakan jalur transportasi utama selain jalur Pantura, sehingga dengan aksesibilitas yang baik serta didukung dengan kelengkapan fasilitas, memungkinkan wilayah ini untuk tumbuh dan berkembang menjadi suatu wilayah pusat pertumbuhan.

Dengan aksesibilitas yang baik dan lokasi yang strategis memudahkan penduduk kecamatan ini untuk melakukan mobilitas dalam berbagai macam aktivitas dan kepentingannya, serta pembangunan yang terus berlanjut dari tahun ke tahun tentunya akan membawa dampak bagi wilayah kecamatan Kartasura. Dalam kurun waktu 6 tahun antara tahun 1995 hingga 2004 tentunya terjadi pergeseran-pergeseran baik itu menyangkut demografi maupun keadaan sosial ekonomi penduduknya.

Perkembangan kKecamatan yang tinggi menyebabkan tekanan yang besar dari penduduk terhadap lahan yang ada. Dengan adanya perkembangan Kecamatan maka akan mempengaruhi adanya perubahan perubahan dalam berbagai aspek sosial, dan ekonomi maka sesuai dengan uraian diatas maka penulis mau mengangkat penelitian tentang perkembangan Kecamatan di Kecamatan Kartasura dengan judul : **ANALISIS PERKEMBANGAN KECAMATAN KARTASURA ANTARA TAHUN 1998 DAN 2004.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada perubahan dalam perkembangan Keruangan wilayah Kecamatan Kartasura antara tahun 1998 dan 2004
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan Keruangan di Kecamatan Kartasura.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui perkembangan Keruangan Kecamatan Kartasura antara tahun 1998 dan 2004
2. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keruangan di kecamatan kartasura.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- 1.3 Sebagai bahan penyusunan skripsi maupun prasyarat untuk menempuh kelulusan sarjana tingkat S1 di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 1.4 Bahan masukan bagi pemerintah daerah kecamatan Kartasura dan kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan dan pengambilan kebijaksanaan pembangunan.

### **1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya**

Dalam geografi terpadu (*Integrated Geographic*) setidaknya terdapat tiga pendekatan sebagai cara untuk memahami suatu fenomena, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bintarto dan Surastopo (1979) ketiga pendekatan itu adalah:

- 1.6 Pendekatan keruangan yaitu pendekatan berdasarkan aspek lokasi sebagai suatu ruang, yang mempelajari lokasi mengenai perbedaan sifat atau seri sifat penting.
- 1.7 Pendekatan ekologi yaitu mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungannya kemudian dipelajari keterkaitannya.
- 1.8 Pendekatan kompleks wilayah yaitu merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi.

Melihat wilayah tertentu dengan konsep *areal differentiation*, yaitu suatu anggapan bahwa interaksi wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. Oleh karena itu terdapat permintaan dan penawaran antar daerah. Pada analisa ini diperhatikan pula penyebaran fenomena tertentu dan interaksi antar variabel manusia dan lingkungan untuk kemudian dipelajari keterkaitannya. Dalam hubungannya dengan analisa kompleks wilayah ini ramalan wilayah (*regional forecasting*) merupakan aspek-aspek dalam analisa tersebut (Bintarto dan Surastopo, 1979).

Analisa regional merupakan masalah alokasi geografi dari sumber daya suatu negara (Fisher, dalam Prisma 3, 1975). Selanjutnya Fisher menyebutkan ada dua jenis umum analisa regional, ialah analisa yang berhubungan dengan konsep homogenitas (*regional homogeneity*) dan analisa yang berhubungan dengan konsep sentralisasi regional (*regional centrality or nodality*). Konsep homogenitas memandang daerah dari segi tata ruang (*spatial organization*) dari berbagai aktivitas dan sumber daya. Tempat yang sentral adalah suatu pemukiman yang menyediakan jasa bagi penduduk di belakangnya (Sitohang, 1997)., tempat yang sentral lokasinya merupakan tempat partisipasi penduduk yang jumlahnya maksimal. Baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan. Tempat-tempat sentral tersebut memiliki luas cakupan daerah yang berbeda-beda (Sumaatmadja, 1988).

Dalam teori tempat sentral ini menuntut adanya hirarki, yang berarti juga hirarki permukiman yang ada (Sitohang, 1977) menyebutkan bahwa suatu sistem pusat yang hirarkis dapat menghindarkan duplikasi dan pemborosan. Sistem hirarki adalah suatu cara yang relatif efisien untuk pengadministrasian dan pengalokasian sumber daya di dalam suatu daerah, memudahkan terwujudnya manfaat-manfaat sosial yang ditimbulkan oleh keuntungan-keuntungan skala.

Bintarto (1984) berpendapat bahwa pembentukan hirarki yang jelas antar permukiman akan membantu pertumbuhan dan perkembangan daerah pedesaan dan juga memperbesar tingkat kemudahan penduduk desa dalam mendapatkan pelayanan akan kebutuhan barang dan jasa dalam usaha pemenuhan kebutuhan

dan kesejahteraan mereka. Kota-kota menengah dan kota kecil diharapkan dapat menjadi suatu “*Central Places*” bagi daerah pedesaan disekitarnya. Wilayah kota dengan permukiman yang terbesar dalam suatu wilayah akan menyediakan barang dan pelayanan yang paling besar jumlahnya dan paling banyak macamnya. Sedangkan wilayah yang kecil dengan permukiman terkecil menyediakan barang dan pelayanan yang paling sedikit jumlahnya serta terbatas macamnya

Untuk menghindari terjadinya polarisasi keruangan seperti yang diperlihatkan oleh banyak negara yang sedang berkembang sebagai akibat pemusatan pembangunan di kota-kota besar dan metropolitan, yang pada akhirnya menyebabkan kecilnya “*Trickle Down Effect*” maka kota-kota menengah dan kecil yang sudah ada harus senantiasa diusahakan supaya dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Rondinelli (1983) sistem kota-kota menengah yang terpadu, kota-kota kecil (*small town*) dan pusat-pusat yang tersebar lebih luas dan semakin merata membantu mengurangi perbedaan wilayah dan perbedaan antara desa dan kota. Lebih lanjut Rondinelli mengemukakan kota-kota menengah dan kota-kota sekunder diperlukan untuk menjembatani dan menghubungkan metropolitan dan kota besar dengan kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Sistem kota-kota menengah yang terkait secara efisien dengan pusat-pusat urban yang lain, baik yang lebih besar atau yang lebih kecil dan dengan jaringan pelayanan pedesaan serta dengan kota-kota pasar (*market town*) dapat membuat kontribusi yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara meluas dan distribusi pendapatan yang berimbang.

Kota-kota besar dan metropolitan memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini menimbulkan permasalahan yang serius dalam hal pemenuhan kebutuhan akan perumahan, air bersih, air minum, polusi, limbah, pengadaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan lapangan kerja. Selain daripada itu kota besar dan metropolitan merupakan daerah dengan konsentrasi sumber daya nasional, fasilitas-fasilitas pelayanan publik banyak terdapat di daerah ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga fasilitas terbesar ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk negara.



Menurut Hadi Sabari Yunus (2005) dampak perkembangan kota dapat berlangsung dalam dua arah yaitu perkembangan spasial sentrifugal konsentris dan perkembangan spasial sentripetal. Yang dimaksud dengan perkembangan areal kekotaan yang terjadi di sisi luar daerah kekotaan yang telah terbangun dan menyatu dengannya secara kompak. Perkembangan sentrifugal akan mempengaruhi daerah pinggiran kota yang berkaitan dengan dengan peri kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan biotik, abiotik dan spasial itu sendiri. Perkembangan spasial sentripetal adalah suatu proses penambahan bangunan-bangunan kekotaan yang terjadi dibagian dalam kota. Proses ini terjadi pada lahan-lahan yang masih kosong di bagian dalam kota baik berupa lahan yang terletak diantara bangunan-bangunan yang sudah ada maupun pada lahan-lahan terbuka lainnya.

Harjanti (2000) dalam penelitiannya yang berjudul perkembangan Wilayah Kecamatan Kartasura Antara Tahun 1985 sampai Tahun 1995, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan sosial ekonomi di Kecamatan Kartasura dalam kurun waktu 10 Tahun. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder, dimana diketahui bahwa dalam kurun waktu 10 Tahun tersebut, Kecamatan Kartasura mengalami banyak peningkatan meliputi sektor industri, perdagangan, dan keberadaan fasilitas sosial ekonomi . peningkatan ini terkait erat dengan lokasi wilayah kecamatan ini yang sangat strategis yaitu berada pada daerah pertemuan jalur transportasi yang menghubungkan Surakarta dengan dengan kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Semarang, yang berdampak pada kemudahan lalulintas barang dan jasa yang mendorong tumbuhnya ekonomi wilayah.

Edwin Arif (2005) melakukan penelitian mengenai kecenderungan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora dengan judul penelitian Analisa Geografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 1998-2002. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi antara kecamatan di Kabupaten Blora dan mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa data sekunder, dengan hasil penelitian yaitu

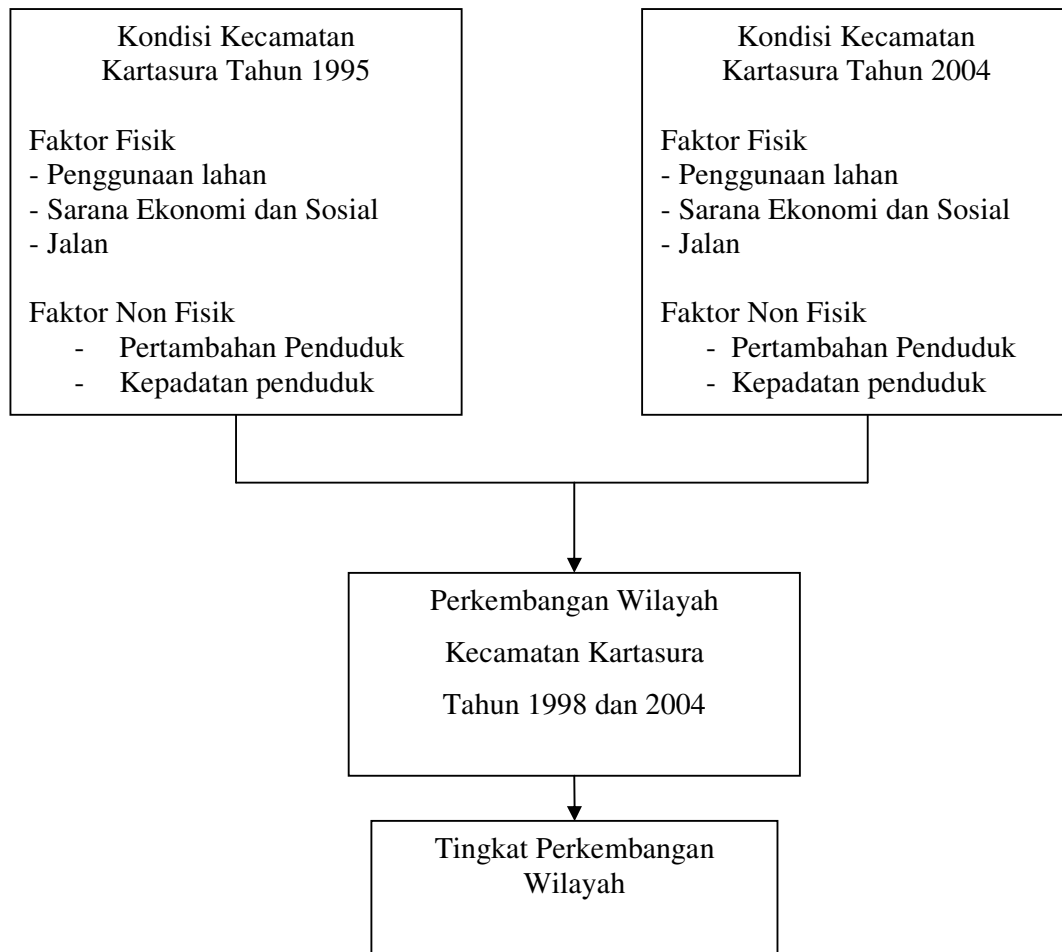
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora masih menunjukkan adanya kecenderungan *Backwash*, atau pertumbuhan ekonomi wilayah inti masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai wilayah pinggiran, dan faktor yang paling berpengaruh terhadap pola pertumbuhan wilayah tersebut adalah pengaruh dari sektor pertanian.

### **1.6 Kerangka Penelitian**

Perkembangan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dapat diamati dari beberapa aspek tergantung dari sudut pandang mana melihatnya, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan fasilitas-fasilitas yang dimiliki atau dapat pula dilihat dari kacamata budaya.

Dalam penelitian ini kecamatan Kartasura dilihat perkembangannya dari sudut pandang sosial ekonomi dan perkembangan demografi penduduknya selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 1998 dan tahun 2004.

Kecamatan Kartasura sebagai suatu lokasi yang memiliki dimensi spasial, di dalamnya bermukim penduduk dengan segala karakteristik dan aktivitas yang beragam, seiring dengan perubahan waktu, Kartasura dan penduduknya pastilah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi dapat menuju ke arah yang positif dalam arti mengalami kemajuan ataupun perubahan negatif yang menunjukkan kemunduran. Perubahan ini dapat diamati dengan cara membandingkan data-data statistik pada tahun 1998 dan tahun 2004 maupun dengan melihat keadaan di lapangan secara langsung

**Gambar Diagram Alir Penelitian**

Sumber: Penulis, 2007

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa data sekunder. Metode penelitian analisis data sekunder menurut Masri Singarimbun (1995) adalah sebuah upaya pengkajian yang berlandaskan pada data statistik yang telah dipublikasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ditambah dengan rujukan pada karya-karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo. Secara administrasi kecamatan Kartasura memiliki 10 desa dan 2 kelurahan. Dipilihnya kecamatan Kartasura sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Selain sebagai kota kecamatan, Kartasura merupakan pusat pertumbuhan yang lokasinya berada dekat dengan Surakarta yaitu di sebelah barat kota Surakarta, kecamatan ini dilalui oleh jalur transportasi utama yang menghubungkan Surakarta dengan kota besar lain.
- b. Fasilitas-fasilitas sosial ekonomi yang berada di kota ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penduduk setempat namun juga dimanfaatkan oleh penduduk dari luar kecamatan Kartasura.

### 2 Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan meliputi: Monografi kecamatan, PDRB kecamatan Kartasura, dan peta.

### 3. Teknik Pengambilan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyalin, memfoto copy, atau meminjam. Apabila terdapat data yang tidak cukup tersedia peneliti mengambil data primer dengan observasi lapangan.

#### 4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data masing-masing item pada waktu yang berbeda ( 1995 dan 2004 )
- b. Menghitung dengan pertambahan jumlah pada masing-masing item dengan perubahan jumlah (Harjanti, 2000)

$$I_i = I_{i95} - I_{i04}$$

Dimana:  $I_{i95}$  = item pada tahun 1995

$I_{i04}$  = item pada tahun 2004

( sumber : Sutrisno Hadi, 1998 dalam Harjanti, 2000)

- c. Jika perubahan bernilai (+) atau jumlah data item I pada tahun 2004 lebih besar dari pada item I pada tahun 1998 berarti mengalami penambahan. Dan jika perubahan bernilai (-) atau jumlah item pada I tahun 2004 lebih kecil dari pada item I pada tahun 1995 berarti mengalami pengurangan.
- d. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perkembangan wilayah dengan menggunakan skoring analisis diskriptif.

Untuk menguji hasil dari pelaksanaan penelitian, maka digunakan suatu teknik analisa. Teknik analisa yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa sederhana dari tabel yang menggunakan beberapa sampel yang telah dipilih. Dari tabel tersebut maka akan dapat diketahui kecenderungan hubungan dua variabel dari nilai masing-masing variabel diambil dari total sekor, setelah itu diklasifikasikan dengan cara nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Klasifikasi kelas dibagi menjadi : tinggi, rendah, dan sedang. Dari klasifikasi kelas tersebut maka akan dapat diketahui daerah-daerah penelitian mana saja yang mengalami tingkat perkembangan dari variabel 1995 dan 2004.

### 1.8 Batasan Operasional

1. **Aksesibilitas** adalah derajat kemudahan untuk menjangkau suatu lokasi dari berbagai arah. (Hardjanti, 2000).

2. **Analisis keruangan** adalah mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting (Haggett, 1972).
3. **Fasilitas sosial ekonomi** adalah kemudahan-kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh fasilitas berupa perumahan, kelembagaan, penerangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan pusat perbelanjaan (Bintarto, 1983).
4. **Kota** : adalah suatu permukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bukan bernafkahkan bukan dari sector pertanian. Kota dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan seperti bangunan yang besar bagi pemerintahan, rumah sakit, sekolah, alun-alun, dan taman yang luas serta jalan yang beraspal dan lebar. (Dickinson, 1992 dalam istiana, M 2002)
5. **Ruang** : adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. (UU tentang Penataan Ruang, Pasal I)
6. **Pembangunan** adalah kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan mencakup sektor pemerintahan maupun sektor masyarakat, diatur dan dilaksanakan dalam suatu ruang dalam usaha untuk menuju kemajuan dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya bersifat peningkatan, pemanfaatan sumber daya serta pemenuhan berbagai kebutuhan (Poernomosidi, 1981).
7. **Penggunaan lahan** adalah segala campur tangan manusia baik secara permanent atau siklus terhadap suatu kumpulan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (Ngadiono dan Bejo Suwandhi, 1978).
8. **Perkembangan** adalah suatu proses perubahan keadaan dari satu keadaan yang lebih baik dalam waktu yang berbeda. Dalam hal ini dapat menyangkut proses yang berjalan secara alami maupun yang berjalan secara artifisial (Yunus, 1978).
9. **Wilayah** adalah bagian dari permukaan bumi yang dibatasi oleh batas-batas tertentu (Hardjanti, 2000).